

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Sejak angin reformasi berhembus kencang di tahun 1998, wajah politik Indonesia mengalami banyak perubahan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Masyarakat Indonesia menemukan kosa kata baru "reformasi" dalam alam sadar kehidupannya dan kemudian menerjemahkannya sesuai dengan interpretasinya masing-masing. Masyarakat memahami reformasi sebagai suatu keharusan terhadap perubahan di semua aspek kehidupan. Selain melahirkan euforia politik, era reformasi juga telah melahirkan sejumlah harapan baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu perkembangan yang bisa dicatat dalam bidang politik adalah bermunculannya banyak sekali partai politik atau dapat disebutkan bahwa Indonesia menganut sistem kepartaian yang multipartai.

Menurut catatan Kompas<sup>1</sup>, secara kuantitatif, perkembangan politik yang ditunjukkan oleh jumlah partai politik pasca orde-baru, menunjukkan jumlah partai mencapai 184 partai. Dari jumlah itu, 148 partai mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman, dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik. Dari 141 partai tersebut, setelah melalui proses seleksi, hanya 48 partai politik yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu pada tahun 1999. Partai politik-partai politik tersebut memang tidak sepenuhnya pendatang baru, karena beberapa diantaranya adalah reinkarnasi dari partai politik yang mati – atau

---

<sup>1</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2005

dimatikan – baik pada masa orde lama maupun orde baru. Dalam rangka menghadapi Pemilu 2004, partai semakin menjamur, tumbuh berkembang lagi menjadi 209 partai politik. Dari sekian ratus partai politik itu, memang tidak seluruhnya menjadi peserta pemilu. Pada Pemilu 2004 hanya 24 partai yang memenuhi syarat ikut pemilu. Sekarang menjelang Pemilu 2009, ada 38 partai politik yang memenuhi syarat ikut pemilu. Sejarah politik kepartaian di Indonesia naik turun. Pemilu pertama tahun 1955 diikuti 30 partai politik. Jumlah ini berubah menjadi 10 partai politik pada pemilu kedua pada tahun 1971, dan kemudian menjadi hanya tiga partai politik pada pemilu ketiga pada tahun 1978.

Sesungguhnya sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mempraktekkan sistem kepartaian berdasarkan pada sistem multipartai, meski dalam derajat dan kualitas yang berbeda. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) menerapkan sistem multipartai dengan tingkat kompetisi yang tinggi, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), meski mempraktekkan sistem multipartai, tetapi tidak ada kompetisi dan hanya sekedar jumlah saja karena partai-partai politik yang ada tidak memiliki peran apa-apa. Begitu juga pada masa Orde Baru dengan jumlah yang hanya tiga, masih disebut sebagai sistem multipartai sederhana. Namun sistem multipartai yang ada pada masa Orde Baru sama dengan masa Demokrasi Terpimpin. Bedanya, pada masa Orde Baru terdapat partai politik dominan, yakni Golkar, yang terus menerus berkuasa sepanjang masa Orde Baru sehingga kerap orang menyebutnya sebagai sistem kepartaian dengan partai hegemonik.

Kini pada masa pasca-orde baru, Indonesia juga menerapkan sistem kepartaian multipartai. Tetapi, seperti telah dikemukakan, karena demikian

banyaknya jumlah partai politik yang ada maka dapat disebut sebagai sistem multipartai yang berjalan sangat ekstrim (hyper multyparties).<sup>2</sup> Meski sudah dua kali pemilu dilaksanakan (Pemilu 1999 dan 2004), ternyata pelaksanaan pemilu itu tidak mengurangi jumlah partai politik. Bahkan sebaliknya, partai-partai politik terus bertumbuhan dan didirikan. Partai-partai politik yang didirikan itu antara lain dari partai-partai yang tidak lolos electoral threshold, atau karena konflik internal atau perpecahan partai, maupun dalam bentuk pendirian partai baru yang tidak ada kaitannya dengan kedua hal dimaksud.

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari berfungsinya demokrasi modern. Selain itu, sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik mempunyai peran yang penting. Keberadaan partai politik sebenarnya merupakan pengakuan atas adanya kebebasan berserikat dan berbeda pendapat. Namun demikian, keberadaan partai politik secara kuantitatif saja tidak akan bermakna bagi kehidupan politik yang demokratis dan tidak bisa dipakai begitu saja sebagai bagian dari tolok ukur bahwa suatu negara itu sudah demokratis. Lebih jauh dari sekedar kuantitas, partai politik juga harus menunjukkan fungsinya dan harus mampu berkompetisi secara bebas dalam suatu pemilihan umum yang bebas.<sup>3</sup>

Mengingat fungsi partai politik yang begitu penting, sering keberadaan dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Meskipun partai politik bukan pelaksana suatu pemerintahan suatu negara. Terutama bagi partai pemenang pemilihan umum, yang seringkali menjadi "pemerintahan yang tersembunyi" karena keberadaannya dalam mempengaruhi ragam kebijakan pemerintah yang berkuasa.

---

<sup>2</sup> Lili Romli, "Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan", Jurnal Politika, Vol.2 No.2, 2006

<sup>3</sup> Leon D. Epstein, "Political Parties in Western Democracy", New Jersey: Transaction Books, 1982, hal.77-80

Terutama pada era pasca orde baru, partai politik secara legal formal berperan sebagai “*bridging institutions for executives and legislatives*” atau sebagai “lembaga penjembutan para eksekutif dan legislatif”, atau sebagai “kendaraan politik” khususnya bagi partai politik pemenang pemilu.

Salah satu syarat dari terwujudnya demokrasi ialah adanya partai politik yang berfungsi maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dan media kontrol terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga parpol mampu memberikan kontribusi terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang bermanfaat bagi konstituennya.

Namun demikian, tidak semua partai politik bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi. Samuel P. Huntington (1968) misalnya menggarisbawahi bahwa hanya partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi yang menjanjikan terbangunnya demokrasi yang lebih baik<sup>4</sup>.

Bergulirnya reformasi ternyata tidak diimbangi reformasi sistem kepartaian ke arah yang lebih progresif untuk mendukung sistem demokrasi Indonesia. Partai politik masih tidak secara signifikan melakukan perubahan. Banyaknya partai politik, menyebabkan suara pemilih menjadi banyak terbagi dan menghambat peluang partai-partai untuk meraih kemenangan mayoritas. Padahal adanya partai politik pemenang mayoritas atau adanya partai yang dominan, merupakan syarat penting bagi efektivitas dan stabilitas pemerintahan yang terbentuk, sebaliknya dengan terlalu banyaknya jumlah partai politik yang memperoleh kursi di lembaga perwakilan itu akan berpengaruh terhadap suatu pemerintahan yang bisa dibangun..<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Huntington, “*Political Order in Changing Societies*”, New Haven and London: Yale University Press, 1968. hal. 31

<sup>5</sup> Wolinetz, Steven, “*Party Systems and Party Systems Type*” dalam Richard S Skatz dan William Crotty (eds), *Handbook of Party Politics*, Sage Publications, London, 2004, hal 51-62

Banyaknya partai politik yang bersaing tajam akan mengundang berbagai konflik dan tentunya tak kondusif dan tak menguntungkan dalam praktik demokrasi dan dapat menumbuhkan ancaman instabilitas pemerintahan. Berbagai konflik tersebut merupakan ancaman terhadap bangunan politik dan stabilitas pemerintahan, dan akan merupakan ancaman pula bagi ketahanan nasional

Perlu disadari bersama bahwa tanpa berbagai perbaikan dan penyempurnaan, maka sistem demokrasi Indonesia termasuk sistem kepartaian akan hanya tampil "*demokratis*", atau hanya berwujud sebagai demokrasi *prosedural* dan bukan demokrasi *esensial* atau *substansial* serta kesulitan menerjemahkan tujuan lebih substantif dari demokrasi, yakni kesejahteraan rakyat. Tujuan berpolitik bangsa kita bukanlah hanya demokrasi itu sendiri. Namun, demokrasi yang di pilih harus bertujuan untuk cita-cita demokrasi, dan kesejahteraan nasional di satu pihak, dan keamanan nasional di pihak lain.

Tujuan dan cita-cita demokrasi adalah seiring dengan tujuan dan cita-cita dari konsepsi ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional, yang berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, pada hakikatnya merupakan suatu cara yang komprehensif. Ketahanan nasional merupakan wadah yang menampung kepentingan nasional yang meliputi kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Atau dengan perkataan lain konsepsi ketahanan nasional adalah pengaturan dan penyelenggaraan aspek kesejahteraan dan aspek keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.<sup>6</sup> Aspek kesejahteraan dan

---

<sup>6</sup> Sastra Wingarta Putu, "*Bali Ajeg: Ketahanan Nasional di Bali*", Penerbit Pensil 234, Jakarta, 2006.

aspek keamanan adalah dua aspek yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan ibarat dua sisi dari sekeping uang logam.

Dalam persoalan sistem kepartaian akan diteliti apa saja kaitannya atau apa dampaknya sistem kepartaian terhadap ketahanan nasional, khususnya memperhatikan kaitan atau dampaknya terhadap gatra politik dari asta-gatra ketahanan nasional. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa semakin rendah tingkat kemajemukan dari suatu sistem kepartaian atau semakin sedikit jumlah partai politik yang efektif, maka akan semakin baik dan memberikan sumbangan positif bagi gatra politik, sedangkan semakin rendah derajat keterbelahan (fragmentasi) sistem kepartaian akan membuat semakin baik sistem politik kepartaian yang berarti semakin rendah pula potensi ancaman bagi gatra politik dan gatra keamanan dari asta-gatra ketahanan nasional. Karena apabila semakin terbelahnya partai-partai politik dalam suatu sistem kepartaian akan mengarah ke situasi politik yang rawan yang memungkinkan terjadinya pertikaian atau konflik yang menimbulkan kerawanan politik yang membahayakan kestabilan pemerintahan dan mengancam ketahanan nasional, sebaliknya keadaan politik yang stabil dan dinamis memungkinkan pembangunan disegala bidang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan nasional yang merupakan konsepsi dasar Ketahanan Nasional.

Salah satu wacana yang terus berkembang tentang sistem kepartaian di Indonesia saat ini adalah yang menyangkut jumlah partai politik yang banyak. Wacana sistem kepartaian telah berlangsung lama, yaitu wacana atau perdebatan untuk mempertahankan sistem banyak partai politik yang ada sekarang di satu pihak, dan upaya untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada di pihak lain.

Akan tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah jumlah partai saat ini sudah efektif, atau suatu saat tanpa paksaan menjadi jumlah yang efektif dan tetap representatif. Sesungguhnya perdebatan ini dimulai sejak awal kemerdekaan atau sejak pendirian Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno saat itu yang menginginkan sistem satu partai yaitu PNI, namun Wakil Presiden Bung Hatta berkehendak lain, sehingga sebagai Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X, 16 Oktober 1945 yang mengundang pendirian banyak partai politik yang ditandai munculnya 25 parpol dan menjelang Pemilu 1955 terdapat lebih dari 29 parpol.<sup>7</sup>

Banyak atau sedikitnya partai politik pada dasarnya tidak memiliki arti yang signifikan dalam proses demokratisasi. Seperti pertanyaan di atas, apakah jumlah partai saat ini sudah efektif, atau sesuai dengan perjalanan demokrasi di Indonesia suatu saat nanti menjadi jumlah yang efektif dan tetap representatif. Sebab, yang terpenting dalam konteks ini adalah bagaimana kelembagaan partai politik itu berfungsi secara efektif dan secara semestinya. Selain itu ada aspek lain yaitu perkembangan pengalaman demokrasi di Indonesia dan perubahan lingkungan eksternal yang cepat dan dinamis yang ditandai dengan perkembangan cepat era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk Ilmu Politik yang merubah berbagai paradigma politik. Sebagai salah satu pilar demokrasi modern, maka kinerja sistem kepartaian dan partai politik dituntut agar lebih aspiratif, efektif, efisien dan amanah. Dipahami pula Sistem kepartaian menyangkut kehidupan negara dan rakyat banyak. Biaya dan korbannya akan terlalu mahal kalau sistem

---

<sup>7</sup> Lihat Herbert Feith, "The Indonesian Elections of 1955" Jakarta: KPG, 1999

kepartaian dan partai politik tidak efektif menjalankan misi dan fungsinya dan terus menerus di dera konflik berkepanjangan.

Dengan menyadari kebutuhan akan hadirnya sistem kepartaian yang mampu menjalankan perannya dengan benar dan efektif, maka perlu diketahui berbagai hal yang terkait dengan sistem kepartaian. Maka dalam paradigma inilah diperlukan penelitian mengenai sistem kepartaian ini agar dapat dijadikan acuan untuk menjawab tantangan realitas pertumbuhan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Bertitik tolak dari kondisi sistem kepartaian Indonesia yang saat ini menganut sistem multipartai dan ditengah perdebatan akan perlunya evaluasi atas sistem kepartaian, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengukur seberapa banyak partai politik yang efektif ada di Indonesia dan mengetahui seberapa besar tingkat kemajemukan partai politik dan derajat fragmentasi (keterbelahan) sistem kepartaian Indonesia saat ini.

Pertanyaan penelitian yang paling mendasar harus dapat menjawab pertanyaan, “ Bagaimana sistem kepartaian di Indonesia saat ini ?” atau ” Berapa jumlah partai politik yang efektif ada ?” dan karena banyaknya partai politik “ Bagaimana derajat keterbelahan (fragmentasi) antar partai politik tersebut ?”. Sehingga wacana dan perdebatannya tidak hanya berkutat pada sekedar jumlah atau jumlah riil partai politik yang ada semata.

Dalam hubungan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel kasus hasil Pemilu DPR 1999 dan hasil pemilu 2004. Namun sebagaimana ada kata-kata bijak yang menyatakan “sesuatu menjadi tidak bermakna tanpa ada perbandingan” atau “ Nothing is

meaningful without comparison”, atau sebagaimana metode eksperimen sebaiknya ada perbandingan atau dengan bahasa awam, bahwa seseorang dapat mengetahui adanya warna putih karena seseorang tahu ada warna hitam. Untuk itu peneliti berusaha membandingkan hasil penelitian di Indonesia dengan sampel hasil pemilu di Inggris tahun 2005, dengan melakukan penelitian dengan metode yang sama pada hasil Pemilu 2005 di Inggris. Mengapa diambil kasus Pemilu di Inggris ? karena di Inggris partainya jumlahnya lebih banyak dari Indonesia yaitu sebanyak 58 partai politik. Selain itu dapat dicatat bahwa Inggris merupakan negara yang memiliki parlemen tertua didunia, dan Inggris merupakan rujukan demokrasi dan kepartaian dunia.

Untuk melakukan penelitian ini, digunakan teori atau model atau rumusan ENPP (Effective Number of Parliamentary Parties). Teori ini dikembangkan oleh Marku Laakso dan Rein Taagepera, dan digunakan untuk meneliti jumlah partai politik yang efektif ada dan sistem kepartaiannya. Dan teori Indeks Rae yang dikembangkan oleh Douglas Rae, dan digunakan untuk meneliti derajat keterbelahan (fragmentasi) suatu sistem kepartaian. Teori Laakso-Taagepera menunjukkan makin besar nilai ENPP maka akan makin ekstrim sistem kepartaiannya. Sedangkan Teori Indeks Rae menunjukkan makin besar nilai Indeks Rae maka semakin tinggi tingkat keterbelahan (fragmentasi) suatu sistem kepartaiannya.

Dari latar belakang inilah, penelitian tentang ” Sistem Kepartaian di Indonesia Dilihat Dari Model Laakso-Taagepera dan Indeks Rae, dan Kaitannya dengan Ketahanan Nasional” penting dilakukan.

## **B. Pembatasan Masalah**

Karena keterbatasan peneliti baik dari aspek kemampuan akademik, waktu, maupun dana, maka penelitian dibatasi hanya pada aspek politik tidak meneliti aspek hukum. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada hasil Pemilu 1999 dan hasil Pemilu 2004. Dan untuk melakukan perbandingan dilakukan pengukuran yang sama atas hasil pemilu di Inggris pada tahun 2005.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian untuk penulisan tesis ini dirumuskan masalah pokok mengenai sistem kepartaian di Indonesia dilihat dari model Laakso-Taagepera dan Indeks Rae dan kaitannya dengan ketahanan nasional, kemudian diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kepartaian di Indonesia saat ini dilihat dari model Laakso-Taagepera dan Indeks Rae ?
2. Bagaimana derajat fragmentasi (keterbelahan) sistem partai politik yang ada ?
3. Bagaimana kaitan antara sistem kepartaian dan ketahanan nasional ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk sistem kepartaian dan jumlah partai politik yang efektif ada
2. Untuk mengetahui derajat Fragmentasi (keterbelahan) sistem partai politik yang ada
3. Untuk mengetahui kaitan antara sistem kepartaian dan ketahanan nasional

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis sebagai sumbangan bagi kajian yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia.
2. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengkaji sistem kepartaian dan kaitannya dengan ketahanan nasional.
3. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para peneliti lainnya dalam mengembangkan penelitian jenis ini di kemudian hari.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian metode kuantitatif yang diperkaya dengan penjelasan-penjelasan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi dan observasi dengan metode penjelasan deskriptif-analitis. Metode ini menekankan pada pengumpulan data dan analisis data dari instansi terkait, serta studi kepustakaan, dan data sekunder lainnya.

Metode penjelasan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, artinya bahwa temuan-temuan tidak hanya dijelaskan secara deskriptif, akan tetapi disertai dengan analisis atas teori-teori terkait, analisis penjas dan hasil-hasil penelitian sejenis ataupun analisis peneliti berupa penjelasan kualitatif atas data kuantitatif yang ditemukan.

Tujuan dari metode kuantitatif adalah untuk menjelaskan, meramalkan, dan / atau mengontrol suatu fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik, selain itu pendekatan metode kuantitatif adalah untuk menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisa numerikal.<sup>8</sup> Metode ini diterapkan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang terkait dengan sistem kepartaian.

Disamping menggunakan metode kuantitatif pada penelitian ini peneliti memperkaya dengan analisa kualitatif. Sebagaimana dinyatakan oleh Moleong (2006:38) bahwa pendekatan tersebut dapat digunakan apabila desainnya adalah

---

<sup>8</sup> Conny Semiawan, dalam Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004

memanfaatkan suatu paradigma.<sup>9</sup> Pendapat ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Glaser dan Straus (1980:18), yaitu bahwa dalam banyak hal, kedua bentuk data tersebut diperlukan, bukan kuantitatif menguji kualitatif, namun tetap kedua pendekatan tersebut tidak dapat digunakan bersama secara sejajar karena paradigmanya atau orientasi teorinya berbeda.<sup>10</sup>

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan judul dan obyek penelitian maka lokasi penelitian di Jakarta. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2008 sampai dengan Mei 2009.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang tepat, relevan, sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, dan untuk mendapatkan jawaban yang mendalam dari permasalahan yang dirumuskan, peneliti berusaha mengumpulkan data numerik yang diperlukan dengan menghubungi Komisi Pemilihan Umum dan instansi terkait lainnya serta mencari bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal-jurnal ilmiah, media cetak, situs internet dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.

Sebagai sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif, data yang dikumpulkan lebih bersifat numerik disamping ada yang kualitatif, sehingga diperlukan ketajaman dalam memilih, memisahkan, kode dikuantifasikan, dihitung dan diadakan pengukuran.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Lihat Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006. hal.38.

Dengan memperhatikan koherensi penelitian maka unit analisis dalam penelitian ini adalah hasil Pemilu DPR 1999 dan hasil Pemilu DPR 2004. Sedangkan sebagai hasil pembandingan adalah hasil pemilu Inggris 2005 (United Kingdom General Elections 2005). Dengan demikian penelitian ini dapat difokuskan pada pengumpulan data dari hasil-hasil suara partai-partai politik yang terlibat dalam pemilihan umum di pemilu 1999 dan pemilu 2004 tersebut. Hasil pemilu tersebut di atas yang dapat diambil dengan mempergunakan sebagai sample bertujuan (*purposive sample*)<sup>11</sup>. Data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian dianalisis melalui kategorisasi-kategorisasi yang sengaja dibangun untuk itu. Hasil suara seluruh partai politik pada kedua pemilu tersebut dihitung dan diperlakukan sebagai *independent variable*. Selanjutnya dihitung pula *independent variable* lainnya yaitu jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai politik yang masuk parlemen. Dengan menggunakan model analisis Laakso-Taggera dan Indeks Rae, maka yang menjadi *dependent variable* pada penelitian ini adalah tingkat kemajemukan sistem kepartaian dan derajat fragmentasinya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan asumsi bahwa tujuan dan metode ilmu sosial adalah sama dengan dengan ilmu fisik/alamiah dengan jalan mencari teori yang dites atau dikonfirmasi yang menjelaskan fenomena. Analisis data dilakukan secara kuantitatif, objektif, terfokus, berorientasi tujuan dan deduktif. Analisis

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

data dengan menggunakan metode analisis isi terhadap data yang dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan menurut derajat relevansi berdasar obyek penelitian, keandalan (reliabilitas), dan kesahihan (validitas). Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu model penulisan eksplanatif-deduktif. Atau proses analisis data tersebut dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan diperkaya dengan penjelasan kualitatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang teori-teori yang relevan dan mendukung yaitu mengenai pengertian demokrasi, partai politik, sistem kepartaian, model Laakso-Taagepera untuk pengukuran tingkat kemajemukan kepartaian, indeks Rae untuk mengukur derajat fragmentasi kepartaian, dan ketahanan nasional.

#### **BAB III Sistem Kepartaian dan Pemilu**

Menguraikan perkembangan Sistem Kepartaian dan perkembangan Pemilihan Umum di Indonesia

#### **BAB IV Sistem Kepartaian di Indonesia Dilihat Dari Model Laakso Taagepera dan Kaitannya Dengan Ketahanan Nasional**

Menguraikan, mengukur hasil penelitian pada hasil suara partai politik dan jumlah kursi masing-masing partai politik pada pemilu 1999 dan pemilu 2004, dan menganalisis hasil penelitian, serta menganalisis Sistem Kepartaian dilihat dari Model Laakso-Taagepera dan Indeks Rae dari perspektif politik dalam kaitannya dengan Ketahanan Nasional.

#### **BAB IV. Penutup**

Berisi kesimpulan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian ini.